



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
UNIT KERJA : RSUD DR. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZENI SUMARTONO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 970247

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.142.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 506 m2/60 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, Rp. 173.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 701 m2/144 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
3. Tanah Seluas 886 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 257.000.000
4. Tanah Seluas 1.843 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, Rp. 152.000.000
5. Tanah Seluas 1.587 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, Rp. 105.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **128.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2PV R M/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **48.565.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	191.134.062
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.510.199.062
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.510.199.062

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.